



## Pemkot Yogya Rombak Struktur Organisasi

■ Yulianingsih

**Pemkot berharap usulan raperda untuk perombakan akan segera dibahas dewan.**

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana untuk merombak struktur organisasi pemerintahannya secara besar-besaran pada tahun ini. Untuk memuluskan rencana tersebut, pemkot sudah menyiapkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda).

Kepala Bidang Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogyakarta, Kris Saronjo, mengatakan, raperda itu mengenai perubahan peraturan daerah tentang dinas, peraturan daerah tentang lembaga teknis daerah, serta peraturan daerah tentang sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Menurut dia, perombakan struktur organisasi ini didasarkan pada kebutuhan pemerintah dalam menangani tugas tambahan dan fungsi yang baru. "Kita sudah bertahan dengan bentuk organisasi seperti ini selama tujuh tahun, sementara kebutuhan pemerintahan dan ketugasan semakin melebar," kata Kris, Senin (9/2).

Perombakan ini sebagian besar terjadi pada dinas dan badan. Ada bagian dalam dinas yang kemudian digabung dengan dinas lainnya. Ada pula yang menjadi kantor, serta ada penggabungan badan menjadi dinas. Semua itu tercantum dalam raperda yang sudah disiapkan. Menurut Kris, usulan perubahan struktur organisasi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama, tetapi belum terealisasi. "Harapannya, usulan kali ini bisa dibahas oleh dewan dan direalisasikan," ujar dia.

Salah satu yang akan mengalami perombakan struktur adalah Dinas Perizinan. Rencananya, ke depan akan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Selama ini, penanaman modal menjadi bagian tersendiri. Menurut Kris, penanaman modal ini adalah bagian baru yang akan mengurus berbagai hal terkait penanaman modal dari hulu hingga hilir. Selain itu, perubahan juga dilakukan untuk Dinas Ketertiban yang menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kris mengatakan, perubahan Dinas Ketertiban ini menyesuaikan dengan amanah undang-undang.

kemudian menjadi Dinas Pertanian, Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup. Menurut Kris, perubahan ini juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kinerja dan layanan pada masyarakat.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pun akan dipisah menjadi Dinas Kebudayaan dan Kantor Pariwisata. Kris mengatakan, pariwisata nantinya akan diampu oleh kantor, karena bidang tersebut akan difokuskan untuk urusan promosi. Selain itu, kata dia, sejalan dengan amanah undang-undang, beban kerja Dinas Kebudayaan akan cukup berat, karena harus mencari, membina, hingga menumbuhkan budaya-budaya yang ada di Kota Yogyakarta. "Seiring amanah Undang-Undang Keistimewaan, kita akan lebih fokus ke kebudayaan dan pariwisata lebih pada promosi saja," ujar dia.

Pemkot juga mengusulkan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadi Kantor Layanan Pengadaan. Pembentukan kantor tersebut, kata Kris, dilakukan untuk menunjang perkembangan kantor yang sudah melayani pengadaan barang dan jasa dari lembaga di luar kota. Pemkot juga ingin membentuk Badan Komunikasi dan Informasi yang merupakan penggabungan Bagian Humas dan Teknologi Informasi.

Bukan hanya itu, ada rencana juga membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Pun dengan Badan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi. Kris mengatakan, badan tersebut memiliki tugas seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Kris, pemkot juga akan membentuk Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Kedaruratan Terpadu. Kantor tersebut terpisah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta. Ia mengatakan, kantor tersebut akan fokus pada kegiatan penanggulangan bencana dan kedaruratan di luar bencana alam.

Mengenai kebutuhan pegawai untuk memenuhi perombakan struktur organisasi tersebut, Kris mengatakan, akan menerapkan efisiensi dan efektivitas pegawai. Menurut dia, penggunaan teknologi informasi dan tata kerja yang efisien akan menjadi kuncinya. Sementara Kepala Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta, Tri Hastono, mengatakan, rencana perombakan...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005